

PERANAN RETRIBUSI SAMPAH DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN DI KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR

St. Aynun Hasanuddin¹, Basri Bado² dan Sri Astuty³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar
email: staynunh17@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar
email: basri.bado@unm.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar
email: sri.astuty@unm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the role of waste retribution in order to support development in Ujung Tanah District, Makassar City. The type of data used in this study is primary data used in this study such as data from observations, interviews, documentation. The methods of analysis in this study are data reduction, data display and Conclusion Drawing/Verification which aims to determine the role of waste retribution in order to support development in Ujung Tanah District, Makassar City. Based on the results of data analysis conducted in this study, it can be concluded that the contribution of waste retribution in order to support development in Ujung Tanah sub-district, Makassar City is still small and tends to decrease. There are several obstacles that cause small waste retribution and never even reach the target, namely low tariffs, limited human resources, limited infrastructure and low public awareness in terms of paying waste retribution. Meanwhile, the collection of retribution for waste/cleaning services in Ujung Tanah Kita District, Makassar has been going well. It is proven that Ujung Tanah Sub-district is a sub-district capable of providing good service to the community. Although there is still improvement in the quality of waste management services both administratively and operationally and the influence of factors such as the resources deployed in the waste service retribution are sufficient, the bureaucratic structure that has been running according to procedural, good communication both vertically and horizontally and disposition (attitude) the provision of service acts has been running according to the rules even though it has been improved internally. In the process of retribution for waste services

Keywords: *Bureaucratic Structure, Communication, Disposition*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan retribusi sampah dalam rangka menunjang pembangunan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti data dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun metode analisis dalam penelitian ini adalah data reduction, data display dan Conclusion Drawing/Verification yang bertujuan untuk mengetahui adanya peranan retribusi sampah dalam rangka menunjang pembangunan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi sampah dalam rangka menunjang pembangunan di kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar masih kecil dan justru cenderung menurun. Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan retribusi sampah kecil dan bahkan tidak pernah mencapai target yaitu tarif yang rendah, keterbatasan SDM, keterbatasan sarana prasarana dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran retribusi sampah. Sedangkan penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kecamatan Ujung Tanah Kita Makassar telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa Kecamatan Ujung Tanah adalah kecamatan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Meskipun masih ada perbaikan kualitas layanan pengelolaan persampahan baik secara administratif maupun operasional serta berpengaruhnya faktor-faktor seperti sumberdaya yang dikerahkan dalam retribusi pelayanan persampahan sudah cukup, struktur birokrasi yang telah berjalan dengan sesuai prosedural, komunikasi yang cukup baik baik secara vertikal maupun horizontal dan disposisi (sikap) pemberian tindak layanan telah berjalan dengan aturan meski perbaikan secara internal. Dalam proses retribusi pelayanan persampahan

Kata Kunci: *Struktur Birokrasi, Komunikasi, Disposisi*

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pembangunan merupakan suatu perencanaan yang dilakukan oleh lembaga dan birokrat perencana pembangunan untuk membuat perubahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konseptualisasi pembangunan adalah proses revitalisasi dan perbaikan yang berkesinambungan pada suatu wilayah masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut. Tolak ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, melainkan juga harus disertai oleh perubahan distribusi pendapatan ke arah yang lebih baik, berkurangnya angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran menurun drastis.

Setiap pembangunan terhadap suatu wilayah memiliki suatu tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan merata serta meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Oleh karena itu, pembangunan adalah salah satu sektor yang memiliki kegiatan penting untuk setiap negara, karena tanpa pembangunan maka kemajuan suatu wilayah dan negara tidak akan berkembang dan maju.

Retribusi merupakan bentuk beban pembiayaan yang memiliki peran penting dalam memajukan sebuah pembangunan Kota. Menurut Kaho (2007: 151), retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada negara di mana dapat terlihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Lebih lanjut dinyatakan bahwa retribusi itu adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa Kota Makassar sebagai salah satu Kota yang pembangunannya sangat pesat, tentu tidak lepas dari kontribusi dari pendapatan daerah berupa retribusi dari segala aspek. Salah satu retribusi yang dipungut oleh pemerintah Kota Makassar adalah retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yaitu pungutan terhadap pelayanan persampahan atau kebersihan oleh Pemerintah Daerah

kepada orang pribadi maupun badan.

Tabel 1.1 Data Pendapatan Asli Daerah (Retribusi Layanan Persampahan) Di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar pada Tahun 2016-2020

No	Tahun	Pendapatan	Anggaran Pembangunan
1.	2016	Rp. 34.144.000,00	Rp. 29.947.000,00
2.	2017	Rp. 67.600.000,00	Rp. 80.000.000,00
3.	2018	Rp. 71.501.000,00	Rp. 100.000.000,00
4.	2019	Rp. 26.921.000,00	Rp. 300.000.000,00
5.	2020	Rp. 23.557.000,00	Rp. 72.774.000,00

Sumber: *Penerimaan SKPD Pendapatan-Fungsional Kec. Ujung Tanah*

Berdasarkan data tersebut tampak pendapatan asli daerah di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, khususnya retribusi sampah. Selama lima tahun terakhir, pendapatan retribusi sampah selalu tidak sampai pada target anggaran yang diharapkan untuk pembangunan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Seperti pada tahun 2016-2018 pendapatan retribusi sangat meningkat sedangkan pada tahun 2019-2020 pendapatan retribusi sampah menurun drastis. Sedangkan anggaran pembangunan dari tahun 2016-2019 terus meningkat dan pada tahun 2020 kembali menurun. Namun demikian, pembangunan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar tetap berjalan dengan baik dengan didukung oleh sumber dana dari pemerintah Kota. Dengan tidak mencukupinya pendapatan retribusi sampah dengan anggaran pembangunan yang dibutuhkan tentu disebabkan oleh berbagai persoalan, termasuk sikap dan kesadaran masyarakat terhadap retribusi, ketegasan pemerintah, serta model layanan yang kurang memuaskan.

Tinjauan Pustaka

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan sebuah pendapat yang diperoleh oleh suatu daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Hal ini sejalan dengan teori dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Ditambahkan pula bahwa pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta lain- lain pendapatn yang

sah.

Hal senada dikemukakan oleh Julitawati dkk. (2012) bahwa, pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Retribusi Sampah

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 64 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan “retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009). Sejalan dengan uraian tersebut, menurut Suparmoko (2001: 85) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Marihot (2013), retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan merupakan suatu pungutan yang dilakukan atas pelayanan persampahan atau kebersihan yang diberikan oleh Pemda kepada orang pribadi maupun badan. Pemungutan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan ini tidak selalu dilakukan pada setiap daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, tergantung atas kewenangan yang diberikan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk mengenakan atau tidak suatu jenis retribusi Kabupaten/Kota terutama terkait retribusi sampah.

Sampah dan Pengelolaannya

Gunawan (2007: 45) menyatakan bahwa pada dasarnya sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil dari aktivitas manusia ataupun proses-proses alamiah yang tidak memiliki nilai ekonomis, bahkan dapat memiliki nilai ekonomi yang negatif dikarenakan pada penanganannya baik untuk membuang ataupun membersihkan sampah tersebut memerlukan biaya yang cukup besar. Sampah sebagai bahan yang tidak berharga dan tidak memiliki nilai dalam maksud biasa atau utama untuk

pembuatan atau pemakaian barang rusak atau cacat dalam produksi manufaktur atau materi yang berlebihan atau ditolak atau buangan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 5 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Sampah dapat sangat bermanfaat jika dikelola dengan baik, oleh karena itu dalam pengelolaaanya diperlukan penanganan yang serius dan biaya yang memadai, salah satunya berupa retribusi yang dibayar oleh masyarakat (Kamalludin, 2013).

Pembangunan

Definisi Pembangunan

Indonesia adalah negara berkembang dalam pelaksanaan pembangunan merupakan suatu upaya mningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan, dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik (Effendi, 2016).

Adanya pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan dan mewujudkan asas keadilan sosial. pembangunan daerah merupakan suatu peroses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdayasumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu peroses, yaitu suatu peroses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri- industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya

untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah (beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada) harus mampu meanksir potensi setiap sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun prekonomian daerah (Arsyad, 2010).

Supardi (2005) menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses sosial yang bersifat integral dan menyeluruh, baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur. Dalam pelaksanaannya, proses pembangunan itu berlangsung melalui suatu siklus produksi untuk mencapai suatu konsumsi dan pemanfaatan segala macam sumber daya dan modal, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber keuangan, permodalan dan peralatan yang terus menerus diperlukan dan perlu ditingkatkan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dapat timbul efek samping berupa produk-produk bekas dan lainnya yang bersifat merusak atau mencemarkan lingkungan sehingga secara langsung atau tidak langsung membahayakan tercapainya tujuan pokok pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peningkatan pembangunan, pemeliharaan kestabilan ekonomi, sosial dan ekologi harus berjalan serasi dan bersama-sama. Artinya bahwa pembangunan hendaknya bersifat terpadu antara segi ekonomi, sosial dan ekologi dengan tujuan menggunakan ekologi dalam perencanaan pembangunan yang meliputi peningkatan mutu pencapaian pembangunan dan meramalkan sebelumnya pengaruh aktivitas pembangunan pada sumber daya dan proses-proses alam lingkungan yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu Data kualitatif menurut (Suliyanto 2015 : 138) yaitu data dalam bentuk kata- kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti data dokumentasi dari hasil wawancara serta observasi.

Dalam pelaksanaan penelitian ini,

penulis langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dengan meminta izin kepada pihak kantor yakni kepala Dinas dan Tata Ruang dan juga kepada unsur yang menjadi objek penelitian dalam hal ini Staf Seksi Kebersihan.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka fokus penelitian ini adalah peranan retribusi sampah dalam menunjang pembangunan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

Desain penelitian ini diawali dengan adanya masalah kemudian mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang mendukung rumusan masalah.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuh-tumbuhan dan peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan pedoman wawancara/kuesioner.

2. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

3. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data primer.

Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3

(tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:92-99) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak,

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

3. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentukuraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja).

4. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan datayang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kota Makassar, yang kadang dieja Mangkasar; dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung pandang. Ujung Pandang adalah kotamadya dan sekaligus ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke

wilayah selatan Indonesia. Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. Dari gambaran sepintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, Kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain. Dalam mengakomodasi dan memfasilitasi kepentingan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang pengelolaan kebersihan dan ruang terbuka hijau (RTH) serta pemakaman. Selain daripada itu institusi ini memiliki tugas dan fungsi yang sangat luas dalam mengakselerasikan hasil pembangunan.

Mendukung terciptanya pelestarian lingkungan hidup, karena itu kapasitas kinerjanya diharapkan akan lebih efektif dan efisien. Kecamatan Ujung Tanah merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar, yang dibentuk pada hari Rabu tanggal 07 Januari 1998 tindak lanjut dari persetujuan Mendagri nomor 138 /1242/PUOD tanggl 03 Mei 1996 berdasarkan Gubernur Sulawesi Selatan 538/VI/1996 Tahun 1996 tanggal 27 Juni 1996, dengan luas wilayah 5,94 km yang berbatasan Sebelah Utara dengan Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala, Sebelah Timur dengan Kecamatan Manggala dan Kabupaten Gowa, Sebelah Selatan dengan Kecamatan Tamalate Kabupaten Gowa Sebelah Barat Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Tamalate Dalam kurung waktu ± 16 tahun.

Kecamatan Ujung Tanah merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian antara permukaan laut terdiri dari 10 kelurahan menurut jaraknya layak masing-masing kelurahan di kecamatan berkisar 1 km sampai dengan jarak 5-10 km.

Tabel 2.1 Pembagian Luas wilayah Kecamatan Ujung Tanah

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)
1.	Ujung Tanah	1,85
2.	Totakka	2,1
3.	Camba Berua	0,20
4.	Cambaya	0,77
5.	Gusung	2,31
6.	Kodingareng	1,52
7.	Pattingalloang	0,82
8.	Pattingalloang Baru	0,50
9.	Tabaringan	0,36
10.	tamallabba	0,89

Sumber : Kecamatan Ujung Tanah

Dengan Jumlah Penduduk sekitar 37.916 Jiwa (Laki-laki berjumlah 19.048 dan perempuan berjumlah 18.868) pada bulan Januari tahun 2022 dan Adapun lembaga-lembaga milik Pemerintah dan swasta yang mendukung kegiatan pemerintahan Kecamatan Ujung Tanah.

Peran Retribusi Sampah Dalam Menunjang Pembangunan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

Tingkat kontribusi retribusi sampah dalam rangka menunjang pembangunan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar selama tahun 2016-2020 masih relatif rendah dan berfluktuasi yaitu 1,2 persen pada tahun 2016 dan 0,5 persen pada tahun 2020. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,2 persen dan terendah terjadi tahun 2020 yaitu sebesar 0,5 persen. Rata-rata kontribusi sebesar 0,7 persen. Persentase kontribusi pada kisaran 0 sampai dengan 10 persen menunjukkan bahwa kriteria kontribusi masuk ke dalam kriteria sangat kurang. Nilai kontribusi yang rendah menunjukkan bahwa retribusi sampah belum mampu menjadi komponen utama dalam mendorong peningkatan PAD di kota Makassar. Kondisi tersebut memacu pemerintah daerah untuk terus menggali dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi retribusi sampah agar penerimaan retribusi sampah dapat terus ditingkatkan. Diharapkan ke depannya retribusi sampah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi PAD kota Makassar. Kontribusi sampah di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar kota Makassar dapat dilihat dalam dibawah ini :

Tabel 2.2 Kontribusi Retribusi Sampah Di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar tahun (2016-2020).

Tahun	Realisasi Retribusi Sampah	PAD Kota Makassar	Kontribusi (%)
2016	3.564,47	291.836,75	1,2
2017	4.064,92	568.344,30	0,7
2018	6.118.60	735.485,51	0,8
2019	6.616,79	969.644,34	0,7
2020	6.567,29	1.205.243,32	0,5

Sember; Bapenda Kota Makassar

Melalui Tabel 4.2 di atas, dapat terlihat bahwa kontribusi retribusi sampah dalam menunjang pembangunan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar masih kecil dan

justru cenderung menurun. Hal tersebut menunjukkan ada hambatan di dalam mencapai target penerimaan retribusi sampah. Berdasarkan hasil wawancara dari Bapenda dan Dinas Lingkungan Hidup diketahui bahwa terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kontribusi dari retribusi sampah terutama sampah rumah tangga kecil dan bahkan tidak pernah mencapai target.

Indikator Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.

Retribusi Persampahan termasuk ke dalam jasa umum yaitu, jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam melaksanakan pelayanan retribusi kebersihan di Kota Makassar, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Selaku Kecamatan Ujung Tanah berpatokan terhadap standarisasi yang diterapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) yaitu, standar operasional pengelolaan sampah perkotaan dilakukan mulai dari pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan dan pemilahan sampah hingga ke pembuangan akhir sampah, kemudian kegiatan pemilahan dan daur ulang semaksimal mungkin dilakukan sejak dari pewadahan sampah dengan pembuangan akhir sampah. Kemudian dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyebutkan bahwa penanganan sampah sesuai dengan Pasal 14 meliputi pengolahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Inilah standarisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar. Dalam ketentuan umum Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi umumnya digunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam realitasnya pemungutan retribusi persampahan yang dilakukan oleh Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar menggunakan karcis berwarna kuning atau disebut juga dengan kwitansi

yang besarnya nilai uang yang harus dibayar sudah melekat, dan hanya berlaku selama satu bulan apabila dilakukannya perbulan dan berlaku per dua minggu apabila pemungutannya dilakukan per dua minggu begitu juga jika dilakukan perminggu maka hanya berlaku selama seminggu. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi ini tidak dijelaskan lebih rinci pemungutan yang bagaimana yang seharusnya dilakukan perminggu ataupun per dua minggu ataupun perbulan, tetapi pihak dinas mengatakan bahwa biasanya pemungutannya dilakukan perbulan apabila terhadap pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu peraturan daerah masih harus dibenahi lagi terutama mengenai pemungutan retribusi sampah ini.

Tabel 2.3 Jenis Layanan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan.

No	Jenis Bentuk pelayanan	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	Pelayanan penyedotan dan pengangkutan limbah cair dan industri lainnya.	Rp. 250.000	Pipa tidak lebih dari 25m
2.	Sewa pipa penyedotan limbah tinja industri	Rp. 5.000	Per meter pipa
3.	Pelayanan sampah angkutan rumah tangga	Rp. 35.000	Per m2 secara manual/bulan
4.	Pelayanan angkutan sampah komersial	Rp. 30.000	Per m2 secara manual/alat Berat
5.	Pengangkutan sampah luar biasa	Rp. 35.000	Per m2 secara manual/bulan
6.	Pelayanan angkutan sampah kawasan perumahan elit dan jalan perkotaan	Rp. 50.000	Per m2 secara manual/bulan
7.	Pelayanan angkutan sampah rumah toko diluar kawasan perdagangan	Rp. 50.000	Per setiap bulan
8.	Pelayanan angkutan sampah toko dalam kawasan	Rp. 50.000	Per Satu bulan
9.	Pelayanan angkutan sampah toko diluar kawasan perdagangan	Rp. 45.000	Per Satu bulan
10.	Pelayanan angkutan sampah rumah dan toko dalam kawasan perdagangan	Rp. 60.000	Per sat bulan
11.	Pelayanan angkutan kontainer di atas 2s/d 6 m2	Rp. 150.000	Per satu bulan
12.	Tempat pembangunan langsung TPA tinja	Rp. 25.000	Per satu bulan
13.	Tempat pembuangan langsung TPA sampah	Rp. 20.000	Per satu bulan

	Tamangappa		
14.	Pelayanan angkutan sampah rumah tangga (membuang langsung ke kontainer)	Rp. 30.000 Rp. 10.000 Rp. 8.500	Per satu bulan
15.	Pelayanan angkutan sampah penjual kaki lima	Rp. 3.000 Rp. 10.000 Rp. 8.500	Per satu bulan

Sumber; kecamatan ujung tanah

Transparansi

Unsur transparansi dan keterbukaan dalam konsep good governance merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Transparansi dan keterbukaan perbuatan hukum publik oleh badan atau pejabat administrasi negara merupakan bentuk perlindungan hukum bagi rakyat. Dikatakan demikian, karena dalam hal badan atau pejabat administrasi negara membuat suatu kebijakan atau keputusan administrasi negara maka rakyat mempunyai kepentingan atas kebijakan atau keputusan tersebut harus mengetahui secara transparan atau terbuka. Konsep transparansi adalah merupakan nilai utama dari sistem pemerintahan. Konteks utama aktivitas pemerintah harus diyakini berdasarkan pada transparansi. Terdapat kekuatan publik yang menuntut transparansi lebih besar. Pada hakekatnya ada kaitan dengan percepatan dan pengaruh terhadap organisasi swasta, sebagaimana terus meningkatnya populasi masyarakat. Ini berarti tuntutan publik terhadap transparansi sudah semakin kuat.

Akuntabilitas

Dalam konteks pelayanan publik maka akuntabilitas berarti suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholder". Dengan demikian tolak ukur dalam akuntabilitas pelayanan publik adalah publik itu sendiri yaitu arti nilai-nilai atau norma-norma yang diakui, berlaku dan berkembang dalam kehidupan publik. nilai-nilai atau norma.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar maka dari itu, peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian yaitu :

I. Kontribusi retribusi sampah dalam rangka menunjang pembangunan di kecamatan Ujung

Tanah Kota Makassar masih kecil dan justru cenderung menurun. Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan retribusi sampah kecil dan bahkan tidak pernah mencapai target yaitu tarif yang rendah, keterbatasan SDM, keterbatasan sarana prasarana dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran retribusi sampah. Sedangkan penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa Kecamatan Ujung Tanah adalah kecamatan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Meskipun masih ada perbaikan kualitas layanan pengelolaan persampahan baik secara administratif maupun operasional.

2. Berpengaruhnya faktor-faktor seperti sumberdaya yang dikerahkan dalam retribusi pelayanan persampahan sudah cukup, struktur birokrasi yang telah berjalan dengan sesuai prosedural, komunikasi yang cukup baik baik secara vertikal maupun horizontal dan disposisi (sikap) pemberian tindak layanan telah berjalan dengan aturan meski perbaikan secara internal. Dalam proses retribusi pelayanan persampahan. Secara umum, Indeks Revealed Comparative Advantage (RCA) sebenarnya mengungkapkan pola perdagangan suatu negara, namun dengannya suatu negara dapat diklaim memiliki keunggulan/ ketidakeunggulan komparatif. Asumsi yang mendasari hal ini adalah jika menurut David Ricardo perbedaan produktifitas relatif menentukan pola perdagangan, maka pola perdagangan dapat digunakan untuk mengungkapkan perbedaan dalam produktifitas relatif (Sejkora & Sankot, 2017). Dengan kata lain, suatu negara berspesialisasi pada komoditas

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, maka dari itu peneliti menyarankan: Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar diharapkan dapat mengevaluasi atau mengkaji ulang sistem pemungutan yang ada, menambah dan memperbaiki infrastruktur dalam pengelolaan sampah, lebih tegas dalam pemberian sanksi, serta sosialisasi harus

dijalankan. Untuk masyarakat harus memiliki kesadaran untuk membayar retribusi tepat pada waktunya. Dengan demikian maka penerimaan retribusi sampah semakin besar, serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dan kelangsungan pembangunan dapat berjalan

Daftar Pustaka

Aditjondro, George Junus. 2003. Pola-pola Gerakan Lingkungan: Refleksi untuk Menyelamatkan Lingkungan dari Ekspansi Modal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arikunto, Suharsimi. 2016. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.

Jakarta: Rineka Cipta.

Arsyad, Lincoln. 2010. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE YKPN.

Azwar, Saifuddin. 1998. Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Biklen and Bogdan, R.C., S.K. 1982. Qualitative Research for Education, An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon.

Budihardjo, Eko. 1999. Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota. Yogyakarta: Andi.

Chang, William. 2001. Moral Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Kanisius.

Dessler, Gary. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Bahasa Indonesia Jilid 2. Jakarta: Prenhallindo.

Effendi, Muh. Arief. 2016. The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Ersita. 2016. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA Vol.4 No.1. Manado. Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Gunawan G., 2007. Mengolah Sampah Jadi Uang. Jakarta: Transmedia Pustaka. Hadi, Sudharto P. 2000. Manusia dan Lingkungan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim A. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta (ID): UPP AMP YKPN.
- Hamzah, Syukri. 2013. Pendidikan Lingkungan. Bandung: Refika Aditama.
- Jufaisal. 2016. Analisis Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Sampah
- Kabupaten Rokan Hulu. Skripsi. Rokan Hulu. Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian.
- Kaho, Josef Riwu. 2007. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Kamalludin. 2013. Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang. Jurnal Reformasi. Vol. 3, No. 1: 32-41.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2004. Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Keraf, Sonny. Etika Lingkungan. Jakarta: Kompas.
- Maleong, Lexi. J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marihot Pahala Siahaan, 2013.Pajak Daerah & Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rajawali Pres, Jakarta, h. 1
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. 1992. Qualitative Data Analysis. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi R, 1992. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purba, Johny. 2002. Pengelolaan Lingkungan Sosial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Saifullah. 2016. Efektifitas Peningkatan Retribusi Sampah Terhadap Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Di Kota Banda Aceh. Jurnal. Banda Aceh. Pendidikan Ekonomi Universitas Serambi Mekkah.
- Salim, Emil. 1998. Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Sudaryanto. 1993. Metode dan Aneka Teknik Analisis Data. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sudjana, Nana. 2005. Penyusunan Karya Ilmiah. Bandung: Sinar Baru.
- Sugandhy, Aca. 2007. Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Statistika untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta.
- Supardi, 2005. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UII Press.
- Suparmoko. 2001. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPF.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jakarta : Erlangga.
- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

Yahya, Idhar. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Yusuf, Maftuchah. 2000. Pendidikan Kependudukan dan Etika Lingkungan.

Yogyakarta: Lembaga Studi dan Inovasi Pendidikan.